

White Supremacy, Discourse Violence, and Injustice: Double Standard Political Analysis of the Western World in Conflict Palestine and Ukraine

Mas'odi

ibnumida03@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan

Abstract: *This study tries to examine the ideology of White Supremacy in the West and its impact on geopolitical stability in several Eastern countries. White Supremacy is an ideology that views the white group as superior to the colored group. This ideology is full of nuances of racism with violent discourse that discredits other groups. Collecting data in this study using literature study and analyzed using qualitative research methods. This study aims to examine the process of domination of the West over the East which is full of racism, and the double standard attitude of the West in responding to conflicts in a country. The results of this study show that White Supremacy causes the values of moderation – which are the biological children of democracy – to experience a crisis and do not appear in many Western political policies towards the East. The Israeli-Palestinian conflict, for example, is a concrete example where the West does not sanction Israel, unlike the West did to Russia in the war in Ukraine. This is because Israel and Ukraine are countries that are close to the West, where the right-extreme-radical view is not only widely embraced by the public but also by politicians and government elites.*

Keyword: *White Supremacy, Double Standard, and Moderation Crisis*

Abstrak: Penelitian ini mencoba mengkaji ideologi *White Supremacy* di Barat dan dampaknya terhadap stabilitas geopolitik di beberapa negara Timur. *White Supremacy* merupakan ideologi yang memandang kelompok kulit putih lebih superior dari kelompok kulit berwarna. Ideologi ini sarat nuansa rasisme dengan kekerasan wacana yang mendiskreditkan kelompok lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses dominasi Barat terhadap Timur yang sarat rasisme, dan sikap standar ganda Barat dalam merespon konflik di suatu negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *White Supremacy* menyebabkan nilai-nilai moderasi –yang merupakan anak kandung demokrasi– mengalami krisis dan tidak tampak dalam banyak kebijakan politik Barat terhadap Timur. Konflik Israel-Palestina, misalnya, merupakan contoh konkrit di mana Barat tidak memberi sanksi pada Israel, sebagaimana Barat lakukan terhadap Rusia dalam perang di Ukraina. Hal itu karena Israel dan Ukraina merupakan negara yang dekat dengan Barat, di mana pandangan kanan-ekstrim-radikal tidak hanya banyak dianut oleh masyarakat tetapi juga oleh kalangan politisi dan elit pemerintah.

Kata kunci: *White Supremacy, Standar ganda, dan Krisis Moderasi.*

Pendahuluan

Supremasi kulit putih (*white supremacy*) merupakan ideologi rasis yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang kulit putih lebih unggul dalam banyak hal daripada orang dari rasis lain (Saad 2020). Ideologi rasis ini berkembang sejak lama di dunia Barat dan menciptakan polarisasi akut di masyarakat. Bentuk dari polarisasi ini bisa dilacak di berbagai level identitas maupun wacana, baik itu politik, agama, ras, suku, bahkan hukum. Di Amerika Serikat, misalnya, isu ini berkembang sejak masa kolonial dan mewariskan banyak persoalan kekerasan. Para imigran dengan ras kulit berwarna menjadi masyarakat kelas dua dan kerap mengalami aksi kekerasan baik secara verbal maupun tindakan. Peristiwa tewasnya George Floyd di tangan Polisi Amerika pada Mei 2020 silam, merupakan salah satu contoh kasus di mana sentimen ras di Amerika melahirkan kecurigaan yang berujung pada tindak kekerasan. Peristiwa tersebut kemudian membangkitkan gerakan massa untuk menentang diskriminasi terhadap ras kulit hitam di Amerika dengan menggaungkan slogan “Black Lives Matter”.

Gerakan “Black Lives Matter” merupakan gerakan politik dan sosial terdesentralisasi yang berupaya menyoroti rasisme, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh orang kulit hitam. Gerakan ini merupakan sebuah protes atas bias rasial dan doktrin keistimewaan ras kulit putih yang telah mendistorsi nilai-nilai universalisme yang selama ini dikampanyekan oleh Amerika. Tuntutan kesetaraan hak dan keadilan di mata hukum merupakan isu penting dalam setiap gerakan demonstrasi. Hal itu untuk mewujudkan Amerika yang harmoni dan ramah terhadap ras kulit berwarna dan para imigran dari luar Eropa. Kendati demikian, perlu disadari bahwa pada dasarnya sejarah Amerika dibangun di atas eksploitasi rasial. Amerika, menurut sosiolog Blauner, dibangun atas dasar prinsip bahwa Amerika adalah dan akan tetap menjadi negara kulit putih (Hamidjojo 1981). Karena itu, sejarah perbudakan atas ras kulit hitam merupakan bagian dari kepingan sejarah nyata Amerika.

Kendati perbudakan itu sudah menjadi jejak sejarah dan dihapus melalui terbitnya amandemen ke-13 tahun 1865, diskriminasi yang berbasis rasial tetap

menghantui kelompok kulit berwarna di Amerika. Kekerasan yang tampak tidak selalu dalam bentuk fisik namun juga dalam kebijakan dan artikulasi wacana politik yang cenderung diskriminatif.

Laku diskriminasi itu tidak hanya menyasar kelompok kulit berwarna yang hidup di Amerika, namun juga terhadap negara-negara Timur yang memilih jalan *resisten* terhadap Amerika dan para sekutunya. Dalam konteks ini kekerasan wacana menjadi artikulasi utama Amerika dan Barat dalam kebijakan politiknya terhadap Timur, dan tidak jarang bermuara pada kekerasan fisik. Dan, narasi Timur memang diciptakan oleh Barat dan ditempatkan di posisi subordinat, bukan? Ya, Timur merupakan hasil dari implementasi doktrin ideologis akan superioritas Barat. Timur yang inferior diciptakan untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan Barat yang inklusif dan universal. Konstruksi pemikiran manusia dibentuk dalam oposisi *binner* yang saling menegasi, yaitu Barat 'berbeda' dengan Timur.

Realita yang dihadirkan Barat bukanlah fakta seutuhnya tentang Timur, tetapi hasil dari sebuah konstruksi pemikiran yang terakumulasi dalam narasi-narasi imajiner dengan berbagai kepentingan yang membersamainya (Mas'odi 2020). Narasi imajiner itu kemudian menjadi 'hantu' yang terus mengganggu ruang kesadaran manusia, dengan kepercayaan semu bahwa Timur itu 'beda'.

Konstruksi wacana inferioritas Timur tersebut memungkinkan langgengnya diskriminasi rasial dan kekerasan politik oleh Barat. Nyata atau tidak, bergulirnya wacana yang sarat *stereotype* itu kemudian melahirkan persoalan turunan yang berujung pada kekacauan politik dan ketidakadilan. Dengan menciptakan hegemoni bahasa yang sarat dengan tendensi primordial, Barat melangsungkan proyek-peroyek imperialisme dan kolonialisme di beberapa negara Timur. Hajat imperial tersebut terlihat dalam kebijakan-kebijakan politik Barat yang absurd dan tidak berimbang dalam merespon berbagai konflik. Sebagai contoh, Barat sejak awal terkesan abai dengan aksi penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina. Hal itu berbeda dengan konflik Rusia-Ukraina di

mana Barat lantang melakukan kecaman bahkan menerapkan sanksi-sanksi terhadap Rusia.

Oleh sebab itu, bersandar pada uraian di atas maka dalam artikel ini penulis akan meneliti sejauh mana sikap politik Barat khususnya Amerika dipengaruhi oleh afiliasi politik, sentimen ras, dan dogmatisme ideologi eksklusif yang rasis sehingga membangkitkan hajat melakukan imperialisme. Penelitian ini juga melihat sejauh mana supremasi kulit putih membuat Amerika 'bermuka dua' dan tidak adil dalam merespon konflik yang bergulir di Palestina, di satu sisi, dan Ukraina di sisi yang lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menelaah sumber-sumber tertulis, baik dari buku, artikel jurnal, dan berita di media cetak maupun *online*. Data primer dalam penelitian ini ialah buku yang ditulis Fawas G. Gerges yang berjudul *Amerika dan Islam Politik; Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?* (Gergez 2002). Secara garis besar buku ini membahas tentang seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di negara-negara Islam (Timur), dan diskursus terkait motif yang berkembang di balik kebijakan politik tersebut. Selanjutnya buku Edward W. Said yang berjudul *Orientalisme*, di mana pemikiran Said dalam buku tersebut sekaligus menjadi perangkat teori analisis dalam penelitian ini. Selain itu, beberapa jurnal penelitian yang membahas seputar rasisme di Amerika menjadi sumber rujukan sekunder karena isu ini ada kaitannya dengan motif di balik lahirnya kebijakan luar negeri Amerika. Di antaranya, artikel jurnal yang berjudul *Meningkatnya Aksi-aksi Rasis Terhadap Warga Keturunan Asia dan Amerika Serikat* (Nainggolan 2021).

Semua data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori Orientalisme dari Edward W. Said. Teori ini digunakan dan dijadikan pijakan untuk memetakan aktivitas imperialisme dengan rasisme sebagai basis yang berimplikasi logis pada geneologi epistemologis pengetahuan manusia. Dalam

konteks ini kesadaran manusia 'dipaksa' untuk menerima kesan-kesan negatif tentang Timur yang dikonstruksi secara simultan dan seakan menjadi sebuah *mainstream* pengetahuan yang 'benar'. Puncaknya, diskriminasi rasial dibentuk di atas doktrin keterpisahan dua kutub dunia yang timpang, yaitu Barat dan Timur, yang kemudian menjadi alat untuk merepresi negara-negara yang menentang kepentingan Amerika dan sekutunya.

Represi Amerika dilakukan melalui mekanisme 'permainan bahasa' yang hegemonik dan sarat *stereotype* untuk 'mewajarkan' tindakan yang perlu diambil. Hal ini yang selama ini menimpa Palestina dan beberapa negara Timur Tengah yang konsisten melakukan resistensi terhadap cengkraman Barat di tanah kaya minyak tersebut. Arab digambarkan sebagai bangsa yang terbelakang, keras kepala, emosional, dan bar-bar sehingga perlu untuk 'dितertibkan' dan 'dikondusifkan'. Stigma yang dibangun tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi Barat untuk melakukan aktivitas imperialisme dengan asumsi bahwa bangsa Barat, yang kulit putih dan superior, memang pantas melakukan aktivitas 'penertiban' terhadap ras lain yang inferior.

Barat, Timur, dan Rasisme yang Terorganisir

Pengkotakan dunia menjadi Barat dan Timur dan meletakkannya dalam posisi subordinat merupakan sebuah polemik dan mengindikasikan adanya dominasi kuasa yang timpang. Edward W. Said dalam megnum opus-nya, *Orientalisme*, secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana para orientalis melakukan representasi, abstraksi-abstraksi, dan menggunakan logika imajiner untuk memosisikan Timur sebagai anti-tesa dari Barat. Dalam artian, Timur memang dibentuk dan sengaja dihadirkan oleh para Orientalis, sebagaimana mereka juga menghadirkan Barat. Bedanya, para Orientalis mendudukkan keduanya dalam struktur identitas yang berbeda. Barat sebagai penguasa, pengkaji, sedangkan Timur dikuasai dan objek yang dikaji.

Orientalisme, atau kajian ketimuran, menurut Edward Said itu semacam proyek juga bagi para pengkajinya (Almakin 2015, 55). Dalam kacamata

Orientalis Timur digambarkan sebagai sosok yang eksotis dan mempunyai daya tarik untuk diteliti oleh Barat yang rasional. Timur menjadi ladang intelektual bagi para ilmuwan Barat yang tidak hanya menghasilkan ilmu eksakta sebagaimana simbol modernisme Barat, tetapi juga mitologi-mitologi imanjiner yang oleh V.G. Kiernan disebut sebagai “mimpi kolektif Eropa di siang bolong mengenai dunia Timur” (Said 2010, 78). Karena itu Said menegaskan bahwa relasi kompleks antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan yang menciptakan “manusia Timur” dan –dalam pengertian tertentu– melenyapkan jati-diri mereka sebagai manusia (Said 2010, 40).

Relasi yang dibangun oleh Barat bukanlah relasi komunikatif tetapi sebetulnya represi baru yang dikemas dalam permainan bahasa yang hegemonik. Relasi Barat dengan Timur adalah relasi kekuasaan, dominasi, dan hegemoni yang kompleks (Said 2010, 07). Karena itu, Timur diteliti bukan dalam rangka untuk merangkul atau mengadvokasi, tetapi untuk menguasai. Dan, dalam konteks ini orientalisme menjadi selubung ideologis yang puncaknya adalah hajat untuk melakukan kolonialisme. Ya, orientalisme merupakan nama lain dari kolonialisme. Orientalisme adalah metode menguasai tidak dengan cara mengambil ruang dan sumber daya alam secara langsung, tetapi melalui mekanisme ilmu pengetahuan yang diambil dari ruang-ruang kelas dan perpustakaan. Dalam artian abstraksi-abstraksi tentang Timur diambil oleh Barat dari naskah-naskah yang menyajikan peradaban Timur “klasik”, dan mengubur realita-realita Timur yang modern.

Artinya apa? Artinya, Barat meneliti Timur berdasarkan kepingan-kepingan cerita yang tertulis dalam kertas, lalu dikonstruksi sebagai realitas universal yang absolut. Kesimpulan yang gegabah kemudian dibuat, bahwa Timur yang benar dan otentik adalah Timur yang ditulis dan diceritakan oleh Barat. Dalam konteks ini, Barat melakukan monopoli kebenaran yang bersumber dari suatu *logosentrisme*, yaitu penyeragaman kebenaran yang dipaksakan, bahwa semua makhluk yang ada di Timur itu lemah, terbelakang, emosional, dan bar-bar,

sedangkan Barat sebaliknya. Apakah benar semua orang Timur demikian? Belum tentu.

Inilah salah satu problem ilmu pengetahuan yang selama ini banyak dikritisi oleh para filosof, di mana pencarian kebenaran sering disimpulkan dari hal-hal yang sifatnya partikular dan dianggap sebagai kebenaran universal. Kebenaran bisa dikarang karena adanya kepentingan, dan hal itu dilakukan, salah satunya, melalui mekanisme ilmu pengetahuan. Karena itu, Nietzsche dalam epistemologinya secara tegas mengatakan bahwa pengetahuan tidak untuk mencari kebenaran. Pengetahuan itu untuk mengukuhkan kekuasaan. Pengetahuan itu selalu terkait dengan kehendak untuk berkuasa (*The Will to Power*) (Santoso et al. 2014, 53). Dalam konteks orientalisme, studi ketimuran ini muaranya adalah kehendak untuk menguasai. Melalui apa? Salah satunya melalui permainan bahasa yang direkonstruksi dalam *setting* sosial tertentu.

Dogma klasik dalam tradisi orientalisme salah satunya memang disokong oleh permainan bahasa untuk melakukan generalisasi. Bahwa Barat merupakan pusat peradaban dan layak menjadi percontohan bagi peradaban lain. Karena Barat merupakan pusat peradaban, maka yang lain adalah peradaban pinggiran yang terbelakang. Oleh sebab itu, Barat merasa penting untuk ‘mendidik’ peradaban lain agar lebih maju, beradab, dan rasional. Hal itu dilakukan, salah satunya, melalui proyek demokratisasi yang di dalamnya menjanjikan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Tetapi proyek itu kemudian mejadi buah simalakama, karena bersamaan dengan itu praktik kolonialisme juga dimulai. Fakta ini yang terjadi ketika Barat menjalankan proyek demokratisasi di tanah Arab.

Sebagai contoh kasus, pada saat Presiden Amerika, George W. Bush mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Irak pada 2003 guna membebaskan rakyat dari tirani pemerintah Saddam Hussein, bangsa Arab sudah pernah mendengar semua itu sebelumnya: “serigala pendudukan berbulu domba pembebasan” (Rogan 2011, 07). Dan, benar apa yang dikatakan Said ketika membaca perkembangan orientalisme di Amerika, bahwa orientalisme

diakomodasi menjadi sebetulnya imperialisme baru (Said 2010, 504). Karena itu, tidak sedikit yang kemudian melakukan perlawanan atas hegemoni Barat dalam proyek orientalisme. Salah satu tokoh yang melakukan *counter-hegemoni* Barat adalah Hassan Hanafi, seorang filsuf berkebangsaan Mesir yang pernah mengenyam pendidikan di Prancis.

Melalui karya besarnya *Oksidentalisme*, Hassan Hanafi berupaya membongkar dominasi Barat atas Timur. Semangat yang diusung Hassan Hanafi ialah pembalikan. Menurutnya, Timur harus mampu menjadikan Barat sebagai objek kajian, sebagaimana Barat lakukan terhadap Timur dalam proyek orientalisme. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pembacaan ulang atas peradaban Timur dan juga sekaligus mempelajari peradaban Barat. Cara ini dilakukan bukan bermaksud untuk menguasai, namun sebagai langkah untuk mendudukan Barat di tempat di mana ia dilahirkan. Karena itu, bagi Hanafi oksidentalisme bertujuan mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuatan (Hanafi 1999, 41).

Upaya *counter-hegemoni* sebagaimana dilakukan Hassan Hanafi itu penting dilakukan, setidaknya untuk mengurangi bias pengetahuan tentang Timur. Oksidentalisme bisa menjadi *balance of power* atas narasi imajiner yang dikonstruksi dalam studi orientalisme. Bukan atas dasar sentimen kebencian, tetapi untuk menjernihkan pandangan manusia bahwa sejarah peradaban dunia itu tidak hanya tentang Barat dan Timur. Barat dan Timur merupakan produk imajinasi. Barat dan Timur tidak bisa ditentukan melalui kaca mata geografis. Australia, misalnya, dalam peta dunia posisinya jauh sekali dari Eropa, tapi negara tersebut disebut sebagai negara Barat. Sebaliknya, Rusia yang sebagian wilayahnya termasuk Eropa, dengan postur tubuh dan warna kulitnya yang khas Eropa tidak termasuk negara Barat. Karena itu, realitas Barat dan Timur merupakan realitas fiktif semata dan hanya ada dalam ruang imajinasi para orientalis. Bahkan Samuel P. Huntington menegaskan, bahwa Eropa, Amerika dan Atlantik utara dapat ditemui di dalam peta; sedangkan Barat tidak (Huntington 2012, 51).

Kendati Huntington tidak menemukan Barat dalam peta, narasi Barat dan Timur itu tetap digunakan. Barat tetap menjadi bahasa administratif untuk menandai superioritas peradabannya. Sayangnya, dalam tradisi orientalisme Barat membangun dan mempertahankan identitas keistimewaan dan keadabannya di atas aksi-aksi yang tidak beradab, yaitu rasialisme. Rasialisme menjadi basis struktur yang menyangga kokohnya narasi orientalisme. Karena itu Said membenarkan bahwa anti-Semitisme dan orientalisme memiliki kemiripan (Said 2010, 41). Tidak hanya mirip, bagi penulis anti-Semitisme yang rasis merupakan bagian tak terpisah dari orientalisme.

Rasisme itu bisa dilacak dari pandangan orientalis tentang dunia Arab yang tertuang dalam karya-karyanya, baik karya tulis maupun lukis. Lord Cromer, misalnya, seorang orientalis yang pernah menulis buku tentang Mesir menampilkan orang-orang Timur atau orang-orang Arab sebagai makhluk yang mudah dikecoh, “tak mempunyai energi dan inisiatif,” suka “menjilat,” berpura-pura, licik, tidak menyayangi binatang (Said 2010, 56). Selanjutnya ia mengatakan bahwa “kesalahan” atau bahkan “kejahatan” dalam diri orang Timur adalah karena dia adalah ‘orang Timur’. Narasi stereotip semacam itu juga bisa diterjemahkan dari imajinasi Barat yang tertuang dalam lukisan-lukisannya tentang Timur, di mana dalam lukisan tersebut digambarkan pria Arab yang mabuk sambil menggandeng perempuan sedang menonton tarian perempuan Arab lain di depannya. Lukisan itu bisa dengan mudah kita dapatkan di mesin pencarian di internet dengan cukup menulis “orientalisme” sebagai kata kunci.

Sebab itu, benar apa yang dikatakan oleh John L. Esposito bahwa Barat sering menganggap orang Arab adalah bangsa yang berpindah-pindah atau tuan-tuan minyak, penghuni padang pasir dan pemilik harem-harem, bangsa yang emosional, irasional dan suka berperang (Esposito 1994, 25). Representasi-representasi bernuansan rasis semacam itu terorganisir dengan baik dan rapi dalam satu proyek besarnya, yaitu orientalisme. Suatu modus operandi untuk memuluskan proyek yang lebih besar, yaitu kolonialisme-imperialisme.

White Supremasi dan Standar Ganda Dunia Barat

Jejak-jejak orientalisme tidak hanya bisa ditelusuri dalam produk kajian ilmiah yang tersebar di berbagai macam judul buku atau jurnal penelitian. Mekanisme penguasaan ala orientalis juga bisa kita temukan dalam berbagai kebijakan politik Barat, khususnya Amerika terhadap negara Timur, tidak terkecuali negara-negara Arab. Permainan bahasa, rasisme, dan kekerasan wacana merupakan premis-premis penting yang bisa diidentifikasi dari berbagai kebijakan politik Amerika. Contoh kasus terorisme, misalnya, di mana peristiwa kekerasan politik ini memiliki segudang persoalan dalam definisi dan juga interpretasinya.

Dalam konteks ini Amerika kerap menghindari stigma terorisme atas berbagai aksi kekerasan yang dilakukan di berbagai negara. Amerika berkilah bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan sebuah “aksi pembelaan”, bukan terorisme. Sebaliknya, ketika terjadi kekerasan yang dilakukan pihak lawan dan menjatuhkan korban, maka dengan begitu mudah Amerika menyebutnya sebagai aksi terorisme. Pola seperti ini sering dilakukan Amerika dalam berbagai kasus kekerasan politik di Timur Tengah, yang mana oleh Noam Chomsky disebut sebagai pola *Newspeak*. Pola ini memiliki istilah-istilah penting di dalamnya, yang mengandung suatu arti teknis dipisahkan dari makna lazimnya (Chomsky 1991, 36). Dampak besar dari pola ini adalah terjadinya fenomena *blaming the victim*, yaitu mendudukkan korban kekerasan secara paksa sebagai pelaku. Begitu pula sebaliknya.

Pola *Newspeak* tidak akan berhasil tanpa didukung oleh relasi kuasa yang mapan. Relasi kekuasaan memungkinkan praktik representasi terhadap *liyan* menjadi suatu yang seakan-akan wajar. Dengan modal kekuasaan, permainan bahasa, wacana stigmatik, hingga rasisme menjadi praktik yang seolah halal dilakukan. Bahkan, dalam konteks tertentu rasisme menjadi simbol dari kekuasaan itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dalam metafor *manusia kulit putih* yang jamak ditemukan di negara-negara Barat, dan menjadi penanda identitas akan superioritas suatu ras tertentu. Kulit putih tidak sekedar simbol pembeda dengan jenis warna kulit lainnya, namun menjadi gelembung ideologi dogmatis

yang puncaknya menciptakan ledakan kasus kekerasan terhadap ras kulit berwarna.

Kulit putih bukan sekedar *given* yang keberadaannya bersifat natural, namun dalam kondisi tertentu menjadi gagasan dominan yang memiliki *power* untuk mengonstruksi realitas. Menjadi manusia kulit putih berarti menjadi manusia istimewa yang harus dihormati oleh kelompok kulit berwarna. Sebab itu, supremasi kulit putih (*white supremacy*) bisa menjadi kekuatan hegemonik, yang dalam banyak kasus mendiskriminasi kelompok kulit berwarna. Kasus yang menimpa George Floyd di Amerika merupakan satu di antara banyak kasus lainnya, yang menggambarkan rasisme merupakan persoalan yang serius. Bahkan presiden Amerika, Joe Biden, dalam kasus yang berbeda yaitu menembakan di Buffelo yang menewaskan 10 warga kulit hitam menyebutnya sebagai aksi terorisme domestik (Agustin 2022).

Dalam kesempatan yang sama Biden mengatakan bahwa supremasi kulit putih sebagai racun yang mengalir dalam tubuh politik Amerika. Dengan sesumbar dia menegaskan bahwa ideologi supremasi kulit putih tidak memiliki tempat di Amerika (Agustin 2022). Sebagai kampium demokrasi, tentu kecaman itu merupakan hal yang wajar oleh seorang kepala negara. Biden mempunyai tanggung jawab untuk menjamin stabilitas keamanan negara dari berbagai gangguan yang mengotori wajah demokrasi Amerika. Meskipun demikian, fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri, bahwa polarisasi berbasis rasial di Amerika bukan sebatas purbasangka, melainkan jauh masuk dalam struktur sosial masyarakat Amerika.

Biden tidak bisa mengingkari bahwa proyek pembangunan tembok di perbatasan Meksiko di era Donald Trump itu merupakan implementasi dari rasisme yang melembaga dan secara legal masuk dalam kebijakan politik Amerika. Begitu pula Biden tidak bisa menutupi bahwa parlemen Amerika, khususnya dari kalangan republikan, berusaha untuk mencegah teori ras kritis

atau *critical race theory* (CRT)¹ diajarkan di sekolah dasar dan menengah, yang secara tidak langsung tindakan tersebut akan melanggengkan rasisme di Amerika. Bahkan pelarangan CRT tersebut menjadi salah satu materi kampanye politik oleh para politisi republikan di Amerika.

Di internal Amerika tampaknya Biden harus berusaha lebih keras untuk menekan rasisme agar tidak menciptakan gejolak. Terlebih, sentimen rasial yang mengarah pada kekerasan semakin mengemuka pasca kekalahan Trump dari dirinya. Terbukti, tidak lama setelah pelantikan Presiden Biden pada 21 Januari 2021, dunia dikejutkan dengan kiriman berita, terutama melalui media sosial yang ditayangkan secara viral, antara lain melalui *Youtube* tentang aksi-aksi kekerasan yang diarahkan secara khusus kepada warga AS keturunan Asia (Nainggolan 2021). Lonjakan kasus covid-19 di Amerika juga turut menyumbang angka kekerasan rasial atas warga keturunan Asia, khususnya keturunan China. Data di California dilaporkan, dari Maret hingga Mei 2020 saja, lebih dari 800 insiden kebencian terkait covid dilaporkan dari 34 kabupaten di negara bagian itu, menurut laporan yang dirilis oleh Dewan Perencanaan Kebijakan Asia Pasifik (Sam Cabral 2021).

Berbeda dengan internal Amerika, dalam konteks global kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada Biden. Sepanjang abad yang lalu salah satu hal yang selalu ada dalam kebijakan luar negeri AS adalah semangat untuk “menerapkan demokrasi di luar negeri sebagai cara untuk menjaga keamanan nasional” (Gergez 2002, 06). Demokratisasi Amerika sebatas *cover* untuk menutupi intrik politik yang terpendam di dalam. Wajah politik Amerika yang

¹ Teori ras kritis atau yang bisa disebut CRT merupakan kerangka kerja analisis yang didasarkan pada teori kritis, dan gerakan akademis para cendekiawan dan aktivis hak-hak sipil yang berusaha untuk memeriksa persinggungan ras dan hukum di Amerika Serikat dan untuk menentang pendekatan liberal arus utama Amerika terhadap keadilan berlandaskan ras. Prinsip teori ras kritis adalah bahwa rasisme dan hasil rasial yang berbeda adalah hasil dari dinamika sosial dan kelembagaan yang kompleks, berubah, dan sering kali halus, dari pada prasangka pribadi yang eksplisit dan disengaja. Para ahli teori kritis memandang ras sebagai konstruksi sosial interseksional yang tidak “berdasarkan biologis dan alami”, dan yang memajukan kepentingan orang kulit putih dengan mengorbankan orang-orang dari ras lain. Selanjutnya bisa dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_ras_kritis

tercemar racun rasisme kulit putih—sebagaimana diakui Biden—turut mencemari negara-negara lain yang menjadi korban kebijakan politik Amerika. Dalam artian, rasisme turut meracuni prinsip keadilan dalam produk kebijakan politik Amerika, khususnya menyangkut negara yang memilih jalan resistensi. Ketidakadilan kebijakan politik Amerika setidaknya bisa dilihat dari dua aspek; *pertama*, inkonsistensi Amerika melawan rasisme, dan *kedua*, penerapan sanksi-sanksi oleh Amerika.

Dalam konteks Amerika Joe Biden bersikap antipati dan mengkritik keras ideologi supremasi kulit putih, tetapi di luar Amerika ia memilih diam, bahkan kerap berdiri di belakang barisan kelompok rasialis tersebut. Kasus konflik Israel-Palestina, misalnya, merupakan contoh konkrit di mana Amerika abai dan membiarkan diskriminasi rasial yang berujung aksi kolonialisme terhadap Palestina tetap langgeng hingga sekarang. Tentu Amerika paham bahwa Zionis Israel melakukan aksinya atas dasar sentimen rasial. Sebab, ideologi Zionisme merupakan sebetulnya rasisme dan diskriminasi rasial (Garaudy 1988, 201). Zionisme merupakan ideologi rasis yang mempunyai konvergensi dengan anti-Semitisme, sehingga pengusiran, perampasan, bahkan pembunuhan terhadap bangsa Palestina mirip dengan apa yang dilakukan Nazi terhadap bangsa Yahudi di Jerman, Inggris, Prancis, dan negara Barat lainnya.

Dalam kasus lain Amerika juga bungkam terhadap kasus kejahatan rasial kelompok Batalion Azov di Ukraina. Kelompok yang berdiri tahun 2014 ini merupakan organisasi paramiliter neo-Nazi yang merupakan organisasi sayap kanan (Fadhurrakhman 2017). Kelompok ultra-nasionalis radikal ini mendapat dukungan pemerintah Ukraina dan bahkan masuk dalam struktur militer Ukraina. Jejak kejahatan rasial Batalion Azov tidak jauh berbeda dengan Zionis Israel di Palestina, karena memang keduanya berhubungan dekat dan garis ideologinya sama, yaitu rasisme. Bahkan, kelompok ini juga dilatih langsung oleh para perwira tentara Israel (Adek 2022).

Pemerintah Ukraina menggunakan Batalion Azov untuk melawan anasir-anasir yang dianggap sebagai pemberontak. Sasarannya adalah para separatis

pro-Rusia, yang mayoritas merupakan penduduk wilayah timur Ukraina yang sehari-harinya berbahasa Rusia dan kerap mendapat tindakan diskriminatif karena etnis dan bahasanya. Persoalan ini yang kemudian mengundang perhatian Rusia untuk melakukan invasi dan mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina. Langkah Rusia tersebut sontak mengundang kecaman dan penentangan dari negara-negara Barat para anggota NATO, khususnya Amerika. Karena itu, Rusia harus menerima konsekuensi logis dari sikap politiknya di Ukraina, yaitu menerima tambahan sanksi-sanksi baru dari Eropa dan Amerika. Sanksi tambahan tersebut membuat Rusia menjadi negara dengan rekor sanksi internasional terbanyak, mengalahkan Iran dan Korea Utara (Arbar 2022).

Melihat kasus Israel-Palestina di satu sisi dan Ukraina-Rusia di sisi yang lain, dan bagaimana sikap politik Amerika merespon keduanya, kita dapat melihat bagaimana politik standar ganda Amerika begitu tampak di permukaan. Sebagai kampium demokrasi, Amerika seharusnya bijak dan adil dalam mengambil sikap politik, khususnya dalam memberlakukan sanksi-sanksi. Kalau Rusia mendapatkan sanksi karena kejahatannya menginvasi Ukraina, sanksi yang sama juga seharusnya diberikan pada Israel karena kejahatan luar biasanya yang menjajah Palestina dengan cara-cara *apartheid* sejak deklarasi Balfour hingga sekarang. Nyatanya, Israel tetap melakukan aneksasi dan kekerasan terhadap warga Palestina secara bebas dan terbuka. Pemerintah dan elit politik Amerika tidak ada yang mengecam dengan alasan, bahwa kekerasan yang dilakukan Israel merupakan “aksi pembalasan”, “aksi pembelaan”, atau “aksi mendahului.”

Fakta ini menunjukkan bahwa keberpihakan dan kebijakan politik Amerika dalam merespon konflik bukan berdasarkan siapa pelaku dan siapa korban, tetapi siapa kawan dan siapa lawan. Pelaku kejahatan akan dilindungi selama dia merupakan kawan. Sebaliknya, korban kejahatan akan tetap salah dan diabaikan karena posisinya sebagai lawan. Dalam konteks ini, Amerika kerap menggunakan ‘permainan bahasa’ untuk bisa mengelabui persepsi publik,

bahwa yang dibela Amerika merupakan pihak yang benar, sekalipun ia pelaku kejahatan. Karena itu, Zionis Israel tidak pernah salah atas diskriminasi rasial terhadap bangsa Palestina. Begitupula rasisme Batalion Azov terhadap penduduk Ukraina keturunan Rusia. Yang salah adalah lawan dari kedua organisasi rasis tersebut, baik yang berposisi sebagai pelaku maupun korban.

Itulah 'limbah' dari racun supremasi kulit putih yang mencemari nilai universalisme Amerika. Limbah yang mengotori nilai-nilai holistik demokrasi, yang di dalamnya mengandung semangat moderasi, pluralisme, humanisme dan egaliterianisme. Supremasi kulit putih menjelma menjadi sebetuk kekuatan hegemonik yang bisa mempengaruhi kewarasan pengampu kebijakan menjadi lupa akan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Dengan semua fakta ini, tampaknya memang sulit sekali untuk mencari inisiatif perdamaian dari Barat, khususnya Amerika. Israel berkali-kali melanggar resolusi perdamaian PBB, tetapi Barat diam dan membiarkannya begitu saja. Tidak ada satupun sanksi yang berlaku untuk Israel, karena Amerika selalu menveto dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB. Begitupula dalam konflik Ukraina-Rusia, di mana Barat, bahkan PBB, tidak berinisiatif untuk memediasi perdamaian antar keduanya. Yang terjadi, negara-negara Barat, khususnya Amerika terus menyuplai senjata ke Ukraina, yang mana langkah tersebut bak menyiram bensin di tengah api yang sedang menyala.

Pertanyaannya kemudian, apakah Amerika memberikan senjata itu secara cuma-cuma? Tentu tidak, dan presiden Ukraina sudah mengkonfirmasi hal itu. Volodymyr Zelensky, harus mengkalkulasi hutang senjata pada Amerika setelah perang usai. Dan faktanya, ada sederet anggota Kongres Amerika meraup keuntungan besar dari bisnis senjata dalam perang Ukraina (Muhaimin 2022). Ini bukan fakta baru di balik campur tangan Amerika dalam berbagai konflik di dunia. Artinya, ada kemungkinan Amerika sengaja mendesain perang demi kepentingan bisnis senjata? Rekam jejak Amerika menunjukkan demikian, khususnya dalam konflik Timur Tengah. Dalam konflik antar koalisi Arab Saudi-

Yaman, misalnya, Donald Trump di salah satu komentarnya bahkan menyebut Arab Saudi sebagai sapi perah Amerika (Bisnis Senjata Amerika di Dunia Arab 2018).

Penutup

Barat selama ini dikenal sebagai pion demokrasi dan menjadi model *melting pot* moderasi, pluralisme, dan humanisme. Universalisme Barat menjadi percontohan dan terus diglorifikasi oleh para ilmuwan, politisi, dan tentu juga kalangan orientalis. Proyek demokratisasi Barat terus bergulir di berbagai negara, khususnya di negara-negara Timur. Namun, tidak selamanya proyek tersebut mendapat sambutan baik di berbagai negara, karena benturan cara pandang kerap kali terjadi. Bahwa proyek yang oleh Barat disebut sebagai universalisme, bagi non-Barat disebut sebagai imperialisme. Cara pandang tersebut tidak lepas dari kondisi riil di lapangan, di mana demokratisasi Barat menjelma menjadi praktik penguasaan yang ilegal.

Dalam implementasinya, Barat seringkali mengingkari dan mengaburkan nilai holistik dari demokrasi. Di mana prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghapusan kekerasan rasial tidak berjalan dengan baik. Di Amerika, misalnya, supremasi kulit putih kerap kali meneror dan mendiskriminasi kelompok kulit berwarna. Supremasi kulit putih di Amerika tidak hanya menciptakan persoalan di akar rumput, tetapi juga menjalar di kalangan elit dan politisi Amerika, sehingga kerap melahirkan kebijakan politik yang absurd dan diskriminatif. Amerika mengabaikan penjahatan dan kejahatan rasial Israel di Palestina hanya karena identitasnya sebagai orang Palestina, yang berkulit non-putih dan berdarah Arab. Sebaliknya, Amerika begitu perhatian pada Ukraina, khususnya pada kelompok Batalion Azov, hanya karena identitasnya sebagai orang Ukraina, yang berkulit putih dan berdarah Eropa.

Daftar Pustaka

- Adek. 2022. "Inilah Batalion Ukraina Paling Menakutkan, Ada Unsur Israel Dan Nazi." *JPNN*. <https://www.jpnn.com/news/inilah-batalion-ukraina-paling-menakutkan-ada-unsur-israel-dan-nazi?page=2>.
- Agustin, Dwina. 2022. "Biden Akui Supremasi Kulit Putih Mengalir Di Politik AS." *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/rc2lsm370/biden-akui-supremasi-kulit-putih-mengalir-di-politik-as>.
- Almakin. 2015. *Antara Barat Dan Timur: Batasan, Dominasi, Relasi, Dan Globalisasi*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Arbar, Thea Fathanah. 2022. "Sanksi Dari AS Cs Untuk Rusia Ditambah, Ini Daftar Terbarunya." *CNBC*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220406103342-4-329197/sanksi-dari-as-cs-untuk-rusia-ditambah-ini-daftar-terbarunya>.
- "Bisnis Senjata Amerika Di Dunia Arab." 2018. *ParsToday*. <https://parstoday.com/idnews/world-i53089-bisnis-senjata-amerika-di-dunia-arab>.
- Chomsky, Noam. 1991. *Menguak Tabir Terorisme Internasional*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Esposito, John L. 1994. *Ancaman Islam: Mitos Atau Realitas?* Bandung: Penerbit Mizan.
- Fadhlurrakhman, Faiz. 2017. "Kejahatan Perang Azov Batalion Dalam Konflik Rusia-Ukraina 2014: Perspektiv Konstruktivis." *Journal of International Relations* 3(1): 10-18.
- Garaudy, R. 1988. *Zionisme: Sebuah Gerakan Keagamaan Dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gergez, Fawaz A. 2002. *Amerika Dan Islam Politik: Benturan Peradaban Atau Benturan Kepentingan?* Jakarta: AlvaBet.
- Hamidjojo, Diah Parwati. 1981. "Rasialisme Dalam Karya Sastra Penulis-Penulis Kulit Hitam." Universitas Indonesia.
- Hanafi, Hassan. 1999. *Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*. Jakarta:

Paramadina.

Huntington, Samuel P. 2012. *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*. 12th ed. Jakarta: Penerbit Qalam.

Mas'odi. 2020. "Epistemologi Falsifikasi Popper Dan Mitos Universalisme Barat: Menyoal Proyek Demokratisasi AS Di Dunia Barat." In *International Conference On Islamic Studies & Call For Paper ICIS 2020*, ed. Samsul AR. Pamekasan: STIBA Press.

Muhaimin. 2022. "Bisnis Senjata, Ini Deretan Anggota Kongres AS Untung Dari Perang Rusia-Ukraina." *Sindonews.com*.
<https://www.google.com/amp/s/internet.sindonews.com/newsread/717545/42/bisnis-senjata-ini-deretan-anggota-kongres-as-untung-dari-perang-rusia-ukraina-1647673384>.

Nainggolan, Poltak Partogi. 2021. "Meningkatnya Aksi-Aksi Rasis Terhadap Warga Keturunan Asia Di Amerika Serikat." *Info Singkat XIII(9)*: 7-12.

Rogan, Eugene. 2011. *Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab-Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Saad, Layla F. 2020. *Me and White Supremacy: Combat Racism, Change the World, and Become a Good Ancestor*. Amerika: Sourcebooks.
<https://www.goodreads.com/book/show/46002342-me-and-white-supremacy>.

Said, Edward W. 2010. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat Dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sam Cabral. 2021. "Kejahatan Kebencian Terhadap Orang Asia-Amerika Di AS Meningkatkan: Dari Penghinaan Hingga Pembunuhan." *BBC*.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56249817>.

Santoso, Listiyono et al. 2014. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.